

BAB 2

Kerangka Pemikiran

2.1

2.2 Isu Global Pendidikan

Terdapat dua faktor yang dihadapi oleh pendidikan di masa depan, yaitu semakin tidak jelasnya batas negara dan perkembangan dunia yang serba cepat. Borderless World menuntut pendidikan di satu negara dan di negara lain tidak boleh terlalu jauh berbeda, karena manfaat pendidikan harus mampu memberikan bekal untuk kehidupan yang seakan tanpa batas negara. Di samping harus mampu menerapkan standar dasar yang dapat ditransfer ketika para lulusan harus menghadapi tuntutan kehidupan global.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, pendidikan di masa depan tidak lagi menekankan pada pemberian informasi/ pengetahuan, tetapi lebih mengembangkan kemampuan anak didik tentang bagaimana menggali informasi dan menganalisisnya menjadi suatu simpulan serta menggunakannya untuk memecahkan problema secara arif dan kreatif. Tugas guru bukan lagi menyampaikan informasi atau pengetahuan, tetapi mengembangkan kemampuan belajar anak (*learning how to learn*). Belajar dalam konteks ini dimaknai sebagai aktifitas untuk menggali dan memilih informasi yang diperlukan, menganalisis dan menggunakannya secara bijak dalam memecahkan problema kehidupan yang dihadapi.

Pemikiran tentang pendidikan kecakapan hidup (Life skill education/ LSE) yang akhir-akhir dikembangka juga penting untuk dicermati. LSE ingin mengubah paradigma pendidikan yang cenderung diarahkan untuk penguasaan ilmu pengetahuan menjadi pendidikan yang diarahkan untuk mengembangkan kemampuan menghadapi kehidupan. Dalam konteks ini penguasaan ilmu pengetahuan bukan dihilangkan, tetapi digeser menjadi alat dan bukan tujuan. Dengan demikian jenis dan jenjang ilmu pengetahuan yang dipelajari disesuaikan dengan tantangan kehidupan yang akan dihadapi anak didik.

Kecuali hal-hal yang bersifat konseptual, pendidikan di tahun 2025 juga perlu memperhatikan implikasi keberlanjutan dari penerapan berbagai konsep pendidikan pada awal abad XXI ini. Misalnya kurikulum berbasis kompetensi (saat ini diimplementasikan dalam wujud kurikulum tingkat satuan pendidikan/ KTSP), konsep pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kontekstual, undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, bahkan ngkin juga dampak penerapan undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.

Dalam kaitan ini harus pula diperhatikan gagasan untuk memasukkan sekolah formal keagamaan, mulai dari madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah dan aliyah kedalam tanggung jawab departemen pendidikan nasional. Demikian pula pembinaan sekolah non formal keagamaan seperti pondok pesantren dan lainnya oleh depatemen pendidikan nasional. Sementara itu melihat penolakan berbagai pihak terhadap pelaksanaan ujian nasional (UN) kedepan mungkin ujian nasional hanya dipergunakan sebagai tolok ukur kualitas pendidikan nasional dan tidak

lagi sebagai penentuan kelulusan siswa.

Sehubungan dengan makin terbukanya persaingan dengan lembaga pendidikan dari luar negeri yang umumnya bermutu baik, maka disamping menyiapkan semua sekolah untuk memenuhi standar kualitas nasional (yang pada hakekatnya merupakan standar minimal itu) perlu juga dipikirkan untuk menyiapkan kondisi tersedia lembaga pendidikan nasional bermutu internasional yang relevan dan memadai.

Dalam konteks manajemen berbasis sekolah, sekolah kedepan harus mampu mewujudkan dirinya sebagai miniatur masyarakat belajar (mini learn society). Sekolah menjadi wahana pengembangan siswa, bukan sebagai birokrasi yang sarat dengan beban-beban administrasi. Aktifitas di dalamnya adalah pelayanan jasa, murid adalah pelanggan (client customer) yang datang ke sekolah untuk mendapat pelayanan, bukan bahan mentah (raw input) yang akan dicetak menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dan lainnya adalah tenaga profesional yang terus menerus berinovasi untuk kemajuan sekolah, konsep sekolah sudah selayaknya mengacu kepada konsep sekolah efektif (effective school), yang memiliki profil yang kuat, mandiri, inovatif dan memberikan iklim yang kondusif bagi warganya untuk mengembangkan sikap kritis, kreativitas dan motivasi.

Sekolah harus mampu mempresentasikan karakter kolektif warga sekolah secara keseluruhan (iklim sekolah). Iklim sekolah diupayakan peduli terhadap budaya mutu, budaya progresif, demokratis, partisipasi warga, kejelasan visi dan misi, caring dan sharing (peduli dan berbagi) dan sebagainya. Setiap pribadi dalam konteks learning person ini harus senantiasa belajar seumur hidup (life long learning) dalam jejaring masyarakat belajar (learning society or knowledge society) yang

diperlukan bagi keberlanjutan perkembangan majemuk yang berkesinambungan (continuous multiple development) baik dari setiap individu dan masyarakat dalam abad baru yang berubah (Peter F. Drucker, 1993). Oleh karena itu kebijakan pendidikan kedepan harus diarahkan untuk mampu memfasilitasi masyarakat kurang mampu tanpa melupakan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan.

2.2 Pembaharuan Pendidikan

Menyadari betapa pentingnya peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan dan berbagai upaya telah dilaksanakan. Namun, sepertinya tetap saja belum berhasil membawa masyarakat dan bangsa Indonesia untuk dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bahkan, bila kualitas Sumber Daya Manusia Bangsa Indonesia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hampir setiap tahun peringkat Indonesia selalu berada pada tingkatan yang memalukan harkat dan martabat bangsa.

Kenyataan tersebut ternyata di antaranya disebabkan oleh ketidaktersediaan rencana induk pembangunan pendidikan yang komprehensif, antisipatif dan berwawasan jauh ke depan. di samping itu, pendekatan dan strategi pembangunan yang dilakukan pun hampir selalu mengarah pada *input oriented* dan *macro oriented*. Pendekatan terhadap input ini ditunjukkan hampir pada semua kebijakan yang selalu bersandar pada pemenuhan semua kebutuhan komponen masukan pendidikan, dengan keyakinan akan menghasilkan output yang berkualitas. Tetapi pada kenyataannya, pendekatan dan strategi ini hanya efektif di lingkungan ekonomi dan bisnis. Sedangkan pendekatan makro, ditunjukkan oleh manajemen yang terpusat. Kebijakan yang didasarkan pada proyeksi

secara makro, pada kenyataannya sering kurang menyentuh persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi para pelaksana pendidikan pada tingkat kelembagaan satuan pendidikan.

Kondisi-kondisi tersebut, tentu saja memerlukan pembaharuan-pembaharuan mendasar, baik yang menyangkut objek pembangunan maupun metodologi dalam pelaksanaan pembangunan.

Apabila proses-proses pembangunan pendidikan dipandang dari sudut keilmuan, akan berkaitan dengan makna *imperative* yang merujuk paradigma filsafat keilmuan dengan objek dan metodologi studi yang jelas. Objek pembangunan pendidikan sepatutnya merujuk pula pada paradigma ilmu pendidikan, bukan pada paradigma ilmu non-kependidikan. Ilmu pendidikan mempunyai paradigma yang berbeda dengan paradigma ketatanegaraan maupun politik, baik dalam aspek Antology, aksiologi dan epistemologinya. Walaupun dalam tatanan praktek kependidikan lebih banyak menyesuaikan diri dengan bentuk konstelasi dan proses politik ketatanegaraan, tetapi hal tersebut sebetulnya hanya bersifat kontekstual. Metodologi implementasi teori pembangunan pendidikan, dapat saja merujuk paradigma keilmuan yang selama ini digunakan dalam disiplin ilmu sosial lainnya, namun, dalam aspek substansi ilmu pendidikan mempunyai kekhususan yang sulit didekati dengan paradigma keilmuan lainnya.

Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan pendidikan pada dasarnya akan selalu menyentuh perangkat kendali sistem pendidikan yang universal. Paradigma pendidikan yang selalu didasarkan pada paradigma ilmu-ilmu obyektif, telah terbukti hanya menghasilkan manusia-manusia mekanis yang kurang kreatif.

Karena itu, untuk melakukan pembangunan pendidikan di Indonesia, tidak ada alternatif lain kecuali melakukan pembaharuan orientasi dan pendekatan dalam manajemen pembangunan pendidikan itu sendiri.

Di samping itu, pandangan nilai tentang pembaharuan pendidikan tidak hanya sekedar etika dalam arti 'baik' atau 'tidak baik', namun lebih ditekankan pada tujuan mengapa perlu ada pembaharuan dalam pembangunan pendidikan. 'Nilai' dan tujuan 'baik' dari pembaharuan hanya akan ada apabila pembaharuan itu sendiri dapat menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Jika pembaharuan pembangunan pendidikan harus dilakukan, menunjukkan bahwa dalam pembangunan pendidikan selama ini ada sesuatu yang kurang bermanfaat. Dengan kata lain, kekurangan atau kelebihan dalam pembangunan pendidikan harus dapat ditemukan, dianalisis, disintesis, kemudian dipraktekkan kembali sampai menunjukkan hasil yang lebih bermanfaat.

2.3 Pendidikan dalam Perspektif Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik

Reformasi pendidikan telah dilakukan, dan regulasi atas perubahan kebijakan pembangunan pendidikan nasional telah dimulai. Untuk itu, seluruh kebijakan yang terkait dengan perubahan, penyempurnaan dan pengembangan program pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan harus dilakukan, yang kesemua itu diarahkan pada upaya untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu, sesuai dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan. Pembangunan pendidikan nasional merupakan upaya bersama seluruh komponen pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mewujudkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan amanat UU. No.20 Tahun 2003 pasal I butir 1, pendidikan mempunyai posisi strategis untuk meningkatkan kualitas, harkat dan martabat setiap warga negara sebagai bangsa yang bermartabat dan berdaulat. Dalam konteks tersebut pendidikan harus dilihat sebagai *human investment* yang mempunyai perspektif multi dimensional baik sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Dalam *perspektif sosial*, pendidikan akan melahirkan insan-insan terpelajar yang mempunyai peranan penting dalam proses transformasi sosial di dalam masyarakat. Pendidikan menjadi faktor determinan dalam mendorong percepatan mobilitas vertikal dan horisontal masyarakat, yang mengarah pada pembentukan konstruksi sosial baru. Konstruksi sosial baru ini terdiri atas lapisan masyarakat kelas menengah terdidik, yang menjadi elemen penting dalam memperkuat daya rekat sosial (*social cohesion*). Pendidikan yang melahirkan lapisan masyarakat terdidik itu menjadi kekuatan perekat yang menautkan unit-unit sosial di dalam masyarakat, keluarga, komunitas masyarakat, dan organisasi sosial yang kemudian menjelma dalam bentuk organisasi besar berupa lembaga negara. Dengan demikian, pendidikan dapat memberikan sumbangan penting pada upaya memantapkan integrasi sosial untuk terwujudnya integrasi nasional.

Dalam *perspektif budaya*, pendidikan juga merupakan wahana penting dan medium yang efektif untuk mengajarkan norma, mensosialisasikan nilai, dan menanamkan etos kerja di kalangan warga masyarakat.

Pendidikan juga dapat menjadi instrumen untuk memupuk kepribadian bangsa, memperkuat identitas nasional, dan memantapkan jati diri bangsa.

Bahkan peran pendidikan menjadi lebih penting ketika arus globalisasi semakin kuat, yang membawa pengaruh nilai-nilai dan budaya yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, pendidikan dapat menjadi wahana strategis untuk membangun kesadaran kolektif (*collective conscience*) sebagai warga mengukuhkan ikatan-ikatan sosial, dengan tetap menghargai keragaman budaya, ras, suku-bangsa, dan agama, sehingga dapat memantapkan keutuhan nasional.

Dalam *perspektif ekonomi*, pendidikan merupakan upaya mempersiapkan sumber daya manusia (*human investment*) yang akan menghasilkan manusia-manusia yang handal untuk menjadi subyek penggerak pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu melahirkan lulusan-lulusan bermutu yang memiliki pengetahuan, menguasai teknologi, dan mempunyai keterampilan teknis yang memadai. Pendidikan juga harus dapat menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang memiliki kemampuan kewirausahaan, yang menjadi salah satu pilar utama aktivitas perekonomian nasional. Bahkan peran pendidikan menjadi sangat penting dan strategis untuk meningkatkan daya saing nasional dan membangun kemandirian bangsa, yang menjadi prasyarat mutlak dalam memasuki persaingan antarbangsa di era global.

Di era global sekarang ini, berbagai bangsa di dunia telah mengembangkan *knowledge-based economy* (KBE), yang mensyaratkan dukungan sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

Karena itu, pendidikan mutlak diperlukan guna menopang pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan - *education for the knowledge economy* (EKE).

Dalam konteks ini, satuan pendidikan harus pula berfungsi sebagai pusat penelitian dan pengembangan (*research and development*), yang menghasilkan produk-produk riset unggulan yang mendukung KBE. Pengembangan ekonomi nasional berbasis pada keunggulan sumber daya alam dan sosial yang tersedia, ditambah dengan ketersediaan SDM bermutu yang menguasai Iptek sangat menentukan kemampuan bangsa dalam memasuki kompetensi global dan ekonomi pasar bebas, yang menuntut daya saing tinggi. Dengan demikian, pendidikan diharapkan dapat menyiapkan sumber daya manusia-manusia unggul yang mampu meningkatkan daya saing nasional dan mengantarkan bangsa Indonesia meraih keunggulan bersaing ditingkat global.

Dalam *perspektif politik*, pendidikan harus mampu mengembangkan kapasitas individu untuk menjadi warga negara yang baik (*good citizens*), yang memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, pendidikan harus dapat melahirkan individu yang memiliki visi dan idealisme untuk membangun kekuatan bersama sebagai bangsa. Visi dan idealisme itu haruslah merujuk dan bersumber pada paham ideologi nasional, yang dianut oleh seluruh komponen bangsa. Dalam jangka panjang, pendidikan niscaya akan melahirkan lapisan masyarakat terpelajar yang kemudian membentuk *critical mass*, yang menjadi elemen pokok dalam upaya membangun masyarakat madani. Dengan demikian, pendidikan merupakan usaha seluruh komponen bangsa untuk

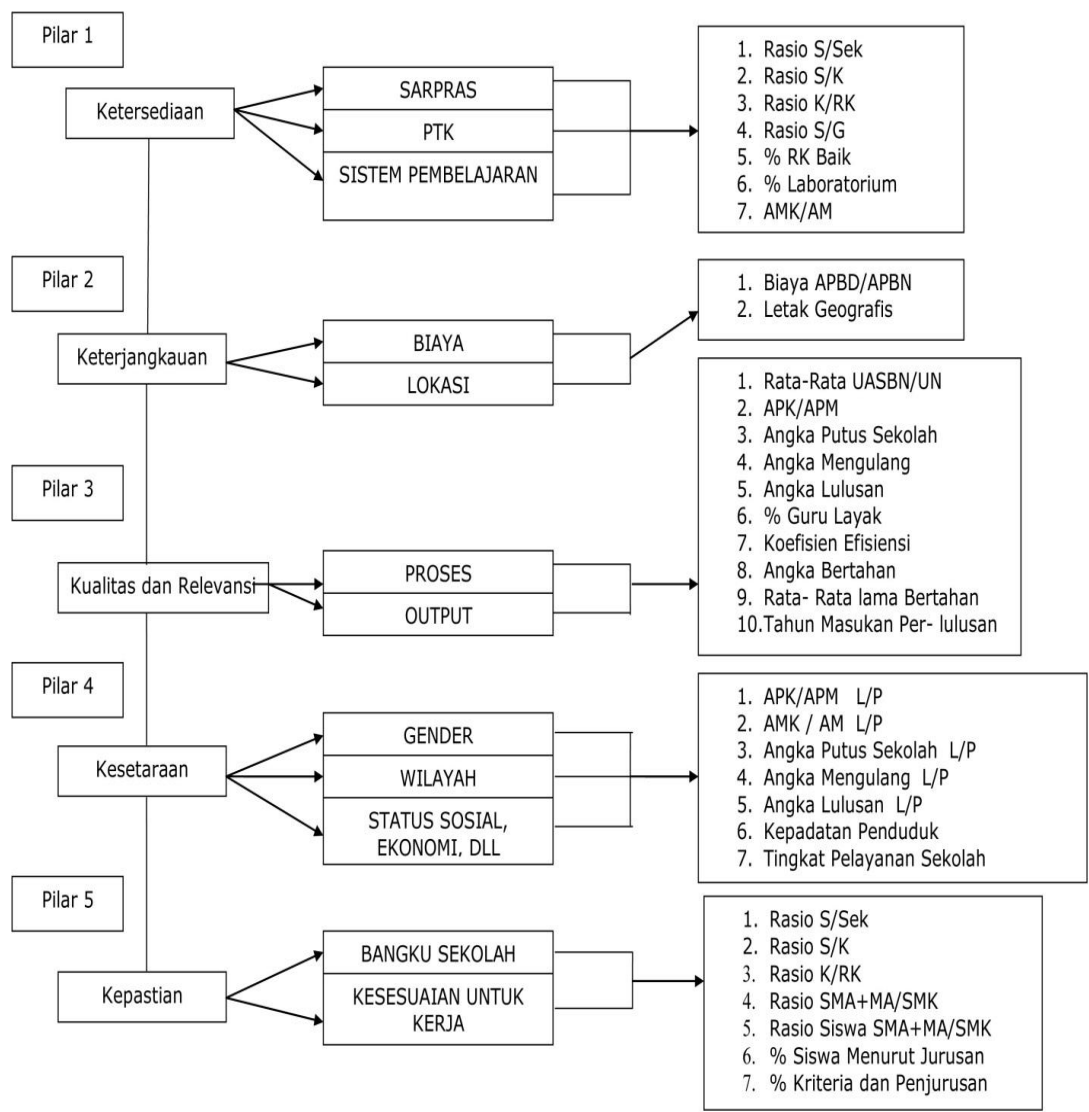
meletakkan landasan sosial yang kokoh bagi terciptanya masyarakat demokratis, yang bertumpu pada golongan masyarakat kelas menengah terdidik yang menjadi pilar utama *civil society*, yang menjadi salah satu tiang penyangga bagi upaya perwujudan pembangunan masyarakat demokratis.

2.4 Pilar-Pilar Kebijakan Pendidikan

Keberhasilan pembangunan pendidikan, tidak saja dilihat dari hasil indikator yang dicapai, tetapi dikaitkan juga dengan dasar hukum perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan, seperti Renstra Pendidikan, SPM (Standar Pendidikan Minimal), Rencana Jangka Pendek, dan lain-lain. Oleh karena itu analisis indikator setiap pilar pendidikan akan saling terkait dengan perencanaan dan evaluasi.

Khusus di bidang Pendidikan, saat ini dicetuskan lima pilar dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional oleh Menteri Pendidikan Nasional yang meliputi pilar pertama adalah Ketersediaan, pilar kedua adalah Keterjangkauan, pilar ketiga adalah Kualitas dan Relevansi, pilar keempat adalah Kesetaraan dan pilar kelima adalah Kepastian. Kelima pilar ini menjadi indikator keberhasilan kinerja pendidikan.

Jabaran akuntabilitas kinerja program pendidikan yang merupakan pilihan dari kelompok indikator kunci sebagaimana disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.1. Pilar-Pilar Kebijakan Pendidikan Sebagai Indikator Kunci Keberhasilan Pendidikan

2.5 Tantangan Pembangunan Pendidikan di Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam bidang manajemen pembangunan pendidikan dewasa ini merupakan sesuatu yang baru, yang memerlukan kecermatan dalam pelaksanaannya, agar tidak menimbulkan dampak negatif.

Dampak negatif ini perlu diantisipasi, karena di samping masih dihadapkan pada berbagai problema, juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus dihadapi.

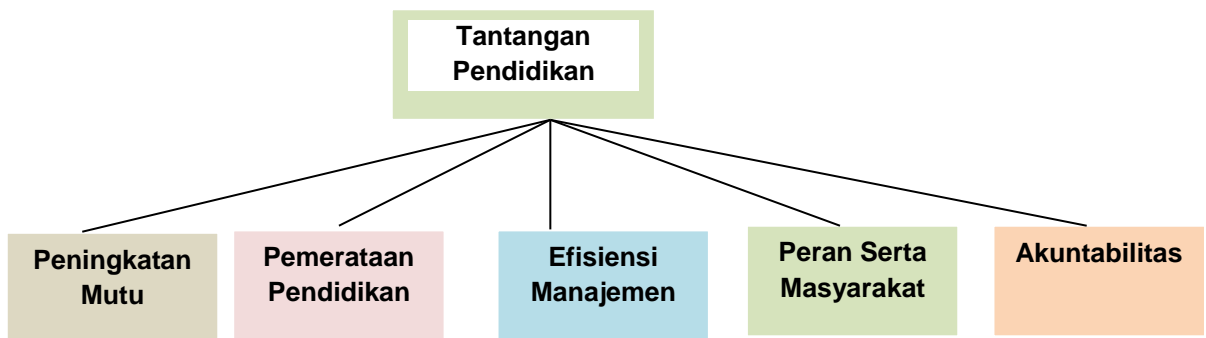
Problema-problema yang berkaitan dengan kualitas pendidikan di daerah, penanganannya memang tidak sesederhana seperti yang dibayangkan. Diakui, bahwa keragaman letak geografis dengan aneka ragam budaya, adat-istiadat, dan bahasa, menuntut adanya pola-pola pelaksanaan pendidikan yang tidak seragam. Keragaman latar belakang lingkungan alam dan pekerjaan, menuntut pula adanya isi dan pola layanan pendidikan yang berbeda.

Tantangan berat pendidikan yang dihadapi dewasa ini sebenarnya telah disinyalir oleh Coombs (1976), yang mengemukakan bahwa krisis yang melanda dunia pendidikan karena muncul ketidak seimbangan peran. Krisis pendidikan disebabkan oleh empat faktor. **Pertama**, *the increase in popular aspirations for education*, yang ditandai oleh tumbuh kembangnya sekolah-sekolah dan universitas di mana-mana, **Kedua**, *the acute scarcity of the resources*, yang ditandai oleh kurang responsifnya sistem pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. **Ketiga**, *the inherent innerlia of educational system*, yang ditandai oleh mengapa pendidikan selalu terlambat berantisipasi untuk menyesuaikan diri terhadap hal-hal di luar dunia pendidikan. **Keempat**, *the innerlia of social ties themselves*, hal-hal seperti sikap tradisional, *prestige and incentive pattern* menghalangi meningkatkan tenaga kerja pembangunan. Tampaknya, apa yang disinyalir oleh Coombs tersebut, masih relevan dengan kondisi di Indonesia.

Tantangan-tantangan berat yang harus dihadapi dalam pembangunan pendidikan di daerah khususnya, berkenaan dengan berbagai aspek yaitu :

- (a) Peningkatan mutu pendidikan,
- (b) Pemerataan pendidikan,
- (c) Efisiensi manajemen,
- (d) Peranserta masyarakat, dan
- (e) Akuntabilitas.

Kelima aspek tantangan tersebut diilustrasikan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Berbagai Aspek Tantangan Pembangunan Pendidikan

Kelima aspek yang menjadi tantangan berat pembangunan pendidikan di Indonesia, yaitu:

Pertama, dalam aspek peningkatan mutu, berkenaan dengan urgensi pemberian otonomi daerah, yang salah satunya adalah untuk menghadapi persaingan global. Setidaknya ada tiga kemampuan dasar yang diperlukan agar masyarakat Indonesia dapat ikut dalam persaingan global, yaitu: kemampuan manajemen, kemampuan teknologi, dan kualitas

manusianya sendiri. Mutu yang diinginkan bukan hanya sekedar memenuhi standar lembaga, atau standar nasional semata-mata, tetapi harus memenuhi standar internasional.

Kedua, dalam aspek pemerataan, berkenaan dengan peningkatan aspirasi masyarakat diperkirakan juga akan meningkatnya pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan. Tetapi ini akan membutuhkan ongkos yang tinggi, dengan semakin tingginya jarak antar daerah dalam pemerataan fasilitas pendidikan, sangat potensial memunculkan ketimpangan dalam perolehan mutu pendidikan. Tanpa intervensi manajemen, anggota masyarakat dari daerah kabupaten/kota yang kaya dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit, akan dapat menikmati fasilitas pendidikan yang jauh lebih baik dari anggota masyarakat pada daerah kabupaten/kota yang miskin. Dan apabila kesempatan pendidikan ini juga mempengaruhi kesempatan untuk memperoleh penghasilan, maka dalam jangka panjang akan berpotensi meningkatnya jurang kesenjangan ekonomi antar daerah.

Ketiga, dalam aspek efisiensi manajemen, berkenaan dengan keterbatasan sumber pendanaan dalam pelaksanaan pendidikan. Dengan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan (*technical efficiency*) maupun efisiensi dalam mengalokasikan anggaran (*economic efficiency*). Fiske, pernah mengungkap pengalaman di Papua New Guinea dan Jamaica, bahwa dengan pelaksanaan otonomi daerah, pembiayaan justru meningkat karena bertambahnya struktur organisasi daerah yang menambah lebih banyak personil pemerintahan tetapi tidak mampu melaksanakan otonomi daerah. Hal ini dapat dijadikan pelajaran, mengingat di Indonesia selama 32 tahun menganut sistem pengelolaan yang sangat sentralistik.

Keempat, dalam aspek peranserta masyarakat, berkenaan dengan filosofi diberikannya otonomi kepada daerah. Peranserta masyarakat dalam pendidikan dapat berupa perorangan, kelompok, lembaga industri atau lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Namun, perlu diantisipasi bahwa peranan masyarakat tersebut cenderung terbatas pada lingkup kabupaten/kota yang bersangkutan. Karena itu, menurut Djam'an Satori, perlu juga intervensi kebijakan nasional yang dapat menerapkan subsidi silang supaya peranserta masyarakat dalam sistem desentralisasi tidak memperlebar jurang ketimpangan pemerataan fasilitas pendidikan antar daerah.

Kelima, dalam aspek akuntabilitas. Melalui otonomi, pengambilan keputusan yang menyangkut pelayanan jasa pendidikan semakin dekat dengan masyarakat yang dilayaninya, sehingga akuntabilitas layanan tersebut bergeser dari yang lebih berorientasi kepada kepentingan pemerintah pusat kepada akuntabilitas yang lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Hal ini menuntut lebih besar partisipasi masyarakat dan orang tua dalam pengambilan keputusan tentang pelaksanaan pendidikan di daerah masing-masing.

Merujuk kelima tantangan berat pendidikan sebagaimana dikemukakan di muka, dapat disimpulkan bahwa kewajiban berat yang dibebankan kepada "Kereta Pendidikan" menjadikan manajemen pendidikan itu sendiri kebingungan menentukan apa yang harus dikerjakannya. Karena, di satu sisi upaya pendidikan harus berfungsi sebagai pengawet kebudayaan negara yang sekaligus berorientasi pada perkembangan dan keterwujudan kemampuan manusia atau *Human Capacity Development* (HCD) yang memiliki daya saing dan bermoral.

Oleh sebab itu, pendidikan harus disediakan buat masyarakat

secara merata (*equality*) dan menjadi aspirasi masyarakat. Di sisi lain lagi, upaya pendidikan harus dinyatakan dalam "kebijakan ekonomi", sebab pendidikan mempengaruhi secara langsung pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. Pendidikan harus dapat menjadikan SDM lebih bisa mengerti dan siap dalam menghadapi pertempuran dan perubahan di lingkungan kerja.

Bila kita mau jujur tentang hasil pendidikan dewasa ini yang kita rasakan, tentunya kita berharap bahwa hasil-hasil pendidikan yang seharusnya diupayakan ialah bagaimana hasil pendidikan itu dapat memberikan makna untuk hidup dan kehidupan, baik untuk masa kini maupun untuk masa depan. Kita kurang berani mengatakan bahwa pendidikan kita sedang kehilangan 'kebermaknaan'. Semakin tinggi tingkat pendidikan, bangsa ini semakin 'manja', semakin 'konsumtif', kurang 'kreatif'. Akhirnya, masyarakat bergelimang dengan orang-orang berpendidikan, tapi rendah dalam iman dan akhlaq. Sebetulnya hanya bergelimang dengan 'kefakiran' dan 'kebodohan', yang kalau tidak ditangani dengan sungguh-sungguh bangsa ini akan penuh dengan SDM-SDM bergelimang dengan 'kekufuran'.

2.5 Urgensi Rencana Induk (Masterplan) Pembangunan Pendidikan

Perencanaan Pembangunan Pendidikan

Pada kasus organisasi pendidikan, sekalipun sudah diberlakukan kebijakan otonomi daerah, manajemen sistem pendidikan di daerah masih mempunyai ruang lingkup kewilayahan.

Secara teoritis, perencanaan pendidikan dapat dibagi ke dalam

tingkat-tingkat perencanaan seperti: tingkat perencanaan makro, meso dan tingkat perencanaan mikro. Dengan istilah yang lebih populer, perencanaan makro adalah perencanaan pada tingkat pusat (nasional), perencanaan meso adalah perencanaan pada tingkat provinsi, sedangkan perencanaan mikro adalah perencanaan pada tingkat kabupaten atau kecamatan. Demarkasi dari pembagian tersebut sebenarnya lebih bersifat kontekstual daripada bersifat konseptual dan teknis.

Lahirnya UU.No.32 Tahun 2004 merupakan langkah strategis dalam sejarah pembaharuan pendidikan di Indonesia. Namun langkah strategis ini harus sudah ditunjang oleh sub sistem perencanaan yang mantap dan terintegrasi, sistem informasi yang akurat untuk mendukung pelaksanaan undang-undang dan peraturan pemerintah. Seandainya sudah memiliki, apakah sistem perencanaan tersebut masih relevan dengan tuntutan undang-undang dan peraturan pemerintah. Pendekatan mana yang mesti kita ambil yang sesuai dengan kondisi objektif Indonesia yang beranekaragam. Penerapan desentralisasi wewenang untuk mengemban fungsi perencanaan nampaknya merupakan alternatif yang perlu segera dilaksanakan. Pola ini tidak berbeda dengan konsep perencanaan mikro yang pada dasarnya merupakan lanjutan dari suatu konsep perencanaan pada semua tingkat perencanaan. Namun perencanaan mikro lebih berakar pada tingkat yang paling bawah (*grassroot level*).

Perencanaan pada tingkatan makro biasanya hanya memperhatikan berbagai sasaran dan prioritas pada tingkat nasional dan atau provinsi.

Sebaliknya perencanaan pendidikan pada tingkatan mikro, memodifikasi sasaran dan prioritas tersebut kemudian disesuaikan dengan kondisi sosio-kultural dan dinamika kehidupan pada tingkat lokal.

Perincian sasaran dan prioritas pada tingkat mikro dapat menyajikan suatu latar belakang yang lebih realistis daripada norma-norma yang bersifat abstrak yang dikembangkan pada tingkat nasional.

Implikasi pada sistem perencanaan pendidikan di daerah, paling tidak menyangkut dua aspek. **Pertama**, dalam aspek pendekatan (*approach*) pendidikan paling sedikit ada tiga pilihan, yaitu pendekatan Tuntutan Sosial, yang didasarkan pada penyaluran kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang paling minimal; Pendekatan *Ketenagakerjaan*, dapat dinyatakan sebagai usaha mengarahkan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan persyaratan tertentu pada tingkat nasional; Pendekatan Untung-Rugi dinyatakan bahwa pendidikan merupakan investasi manusia yang harus memberikan keuntungan secara ekonomis baik secara individu maupun untuk negara, dengan pendekatan ekonomis, yang lebih ditekankan pada efisiensi penggunaan dana. Melihat kondisi umum di daerah, tampaknya belum memungkinkan memilih salah satu pendekatan untuk ditetapkan dalam sistem perencanaan pembangunan pendidikan. Karena itu, perlu dipertimbangkan pendekatan *secara integratif* dari keempat pendekatan itu, sesuai dengan tujuan dan jenjang, jenis dan jalur pendidikan. **Kedua**, masalah proses perencanaan dikenal dalam bentuk pendekatan perencanaan administratif dan pendekatan perencanaan *grass-roots*. Pendekatan proses perencanaan pendidikan menurut UU.No.32 Tahun 2004 pun masih tergolong pendekatan administratif, karena hampir semua perencanaan pendidikan dirumuskan dan ditetapkan secara

administratif, karena hampir semua perencanaan pendidikan didominasi Depdiknas. Namun demikian, kesempatan pengembangan perencanaan yang bersifat *grass-roots approach* sangat terbuka. Pendekatan ini memberi hak kepada para pengelola program pembangunan pendidikan di daerah untuk mengembangkan sistem perencanaan yang dinilai paling cocok dengan daerah atau lembaganya. Hal inilah yang sesungguhnya harus diimplementasikan dalam Rencana Induk (*Masterplan*) Pembangunan Pendidikan di masing-masing daerah. Bila model yang dikembangkan dinilai baik, maka melalui proses *bottom-up* bisa disebarkan sebagai model yang sesuai untuk diterapkan.